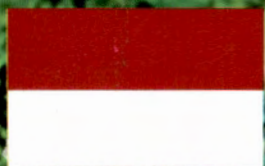


PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - PAPUA NUGINI



DEPARTEMEN PERTANIAN



341.7(910:95)

Bibliografi

551.

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - PAPUA NEW GUINEA



-5

(914,95)



DEPARTEMEN PERTANIAN RI
2001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya **Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral Indonesia – Papua New Guinea**. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan dalam membangun kerjasama secara bilateral dengan negara tersebut.

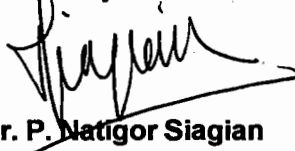
Buku kecil ini merupakan kumpulan informasi awal tentang kerjasama bilateral yang berisikan: keadaan umum negara Papua New Guinea, potensi sumberdaya alam dan pertanian yang dimiliki, perkembangan kerjasama bilateral dengan Indonesia dan peluang kerjasama yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Buku ini merupakan salah satu judul dari 35 judul Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral dan Regional yang disusun oleh Bagian Proyek Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian untuk tahun 2001.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang dalam atas kerja keras tim kecil yang telah menyusun 35 judul buku dalam waktu singkat diantara kesibukan tugas sehari-hari.

Kami menyadari keterbatasan data dan informasi yang didapat, analisis yang masih dangkal serta kemampuan membuat narasi dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan masukan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini pada saat mendatang.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah kerjasama bilateral dengan negara Papua New Guinea.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri



Ir. P. Natigor Siagian



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---------------------------------------|---------|
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| TIM PENYUSUN | iv |
| | |
| I. KEADAAN UMUM | 1 |
| 1.1. Sejarah Singkat | 1 |
| 1.2. Politik dan Pemerintahan | 2 |
| 1.3. Sosial Ekonomi | 4 |
| | |
| II. POTENSI NEGARA | 7 |
| 2.1. Keadaan Geografis | 7 |
| 2.2. Potensi Alam dan Pertanian | 9 |
| | |
| III. PERKEMBANGAN KERJASAMA | 11 |
| 3.1. Kerjasama Bidang Politik | 11 |
| 3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi | 12 |
| 3.3. Kerjasama Teknik | 14 |
| | |
| IV. PELUANG KERJASAMA | 19 |
| | |
| LAMPIRAN | 20 |



DAFTAR TABEL

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM | 19 |



DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1. | Perkembangan Produksi Serealia dan Umbi-umbian Negara Papua Tahun 1991-1998 | 10 |
| 2. | Perkembangan Luas Areal Tanaman Serealia dan Umbi-umbian Negara Papua Tahun 1991-1998 | 10 |



TIM PENYUSUN

- Penasehat** : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
- Pengarah** : Kepala Bagian Kerjasama Bilateral
Kepala Bagian Kerjasama Regional
- Penanggung Jawab** : Ir. Metralinda Tunus, M.Sc./ Kepala Bagian
Kerjasama Multilateral
- Ketua Tim** : Ir. Iwan Ridwan, MM.
- Anggota** : Drs. Djoko Supono, MM.
Ir. Zulkifli Ali, M.Si.
Ade Chandradijaya, S.TP., M.Sc.
Henny Nurliani, S.Pi.
Budi Supriyono
Yayah Mardianah, SE.
Ir. Juariah
Budiarto
Nunik Emawatingtyas
Abidan Rajaguguk
Ending



I. KEADAAN UMUM

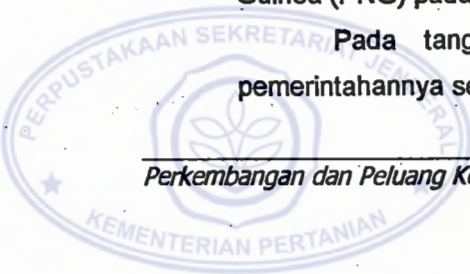
1.1. Sejarah Singkat

Pada tahun 1545, orang Spanyol bernama *Ortiz de Retes* mendarat dan memberi nama *New Guinea* pada tahun 1545, karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea, Afrika. Pada tahun 1562, seorang Portugal bernama *Jorge de Manases* menemukan pantai Barat Irian dan menamakannya *Papua* yang artinya berambut keriting. Tahun 1828, belahan barat Papua yaitu Irian Jaya (sekarang) mulai dikuasai Belanda. Selanjutnya pada tahun 1873, Kapten Moresby menyatakan belahan timur pulau tersebut sebagai wilayah Inggris.

Pada tahun 1884, Jerman berhasil menguasai New Guinea, dan selanjutnya Inggris mengumumkan suatu protektorat yang meliputi bagian Tenggara pulau dan kepulauan di sebelah timurnya. Pada tahun 1895, Inggris dan Belanda menetapkan garis perbatasan wilayah yang dikuasainya. Pada tahun 1905, dengan *Papua Act* Inggris menyerahkan penguasaan wilayahnya pada Australia yang kemudian diberi nama Wilayah Papua.

Pada Perang Dunia I, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea jajahan Jerman dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama Wilayah New Guinea. Pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea. Pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea, namun pada tahun 1964 diganti dengan *House of Assembly* dengan jumlah 64 orang. Melalui "Papua New Guinea Act" ditetapkan perubahan nama menjadi Papua New Guinea (PNG) pada tahun 1971.

Pada tanggal 1 September 1973, PNG memperoleh pemerintahannya sendiri yang dipimpin oleh Chief Minister. Kemudian



pada tanggal 16 September 1975, PNG memperoleh kemerdekaan penuh dari Australia dan selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran. Pada tanggal 10 Oktober 1975, PNG diterima menjadi anggota PBB, sebagai anggota ke 142. Setelah merdeka Chief Minister diganti Menjadi Perdana Menteri, dan diangkat seorang Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris.

1.2. Politik dan Pemerintahan

a. Sistem Pemerintahan

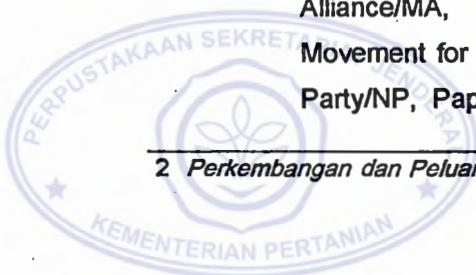
Kepala Negara PNG adalah Ratu Inggris yang diwakilkan pada Gubernur Jenderal. Saat ini yang menjabat Gubernur Jenderal adalah Mr Silas Atopare yang dilantik bulan Nopember 1997 dan dilantik kembali pada tanggal 26 Oktober 1998.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1975, Pemerintahan Nasional PNG terdiri dari tiga badan yakni :

- (1) Eksekutif Nasional (terdiri dari Kepala Negara dan Dewan Eksekutif Nasional) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Kepala Negara atas usulan dari Parlemen Nasional dan mereka juga sebagai anggota Parlemen;
- (2) Parlemen Nasional;
- (3) Sistem Hukum Nasional.

b. Sistem Kepartaian

Papua New Guinea menganut sistem politik multi partai. Partai-partai politik dan pimpinan partainya di PNG adalah sebagai berikut : Black Action Party, Bougainville Unity Alliance/BUA, Christian Democratic Party, Hausman Party, League for National Advancement/LNA, Liberal Party, Melanesian Alliance/MA, Melanesian Labor Party, Milne Bay Party, Movement for Greater Autonomy, National Alliance/NA, National Party/NP, Papua New Guinea First Party (termasuk People's



National Congress/PNC dan Christian Country Party), Papua New Guinea United Party/Pangu Pali, People's Action Party/PAP, People's Democratic Movement/PDM, People's National Alliance, People's Progress Party/PPP, People's Resources Awareness Party, People's Solidarity Party, People's Unity Party/PUP, United Party/UP, United Resource Party.

c. Parlemen

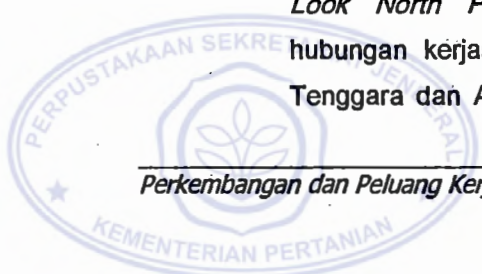
Parlemen Nasional PNG mengikuti model "Westminster Liberal Democracy" dengan sistem satu kamar (unikameral). Jumlah anggota Parlemen Nasional adalah 109 orang yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Anggota Parlemen hasil pemilu bulan Juli 1997 dan dilantik pada tanggal 22 Juli 1997.

d. Sistem Peradilan

Terdiri dari Mahkamah Agung (Supreme Court), National Courts, Local Courts, Village Courts dan Land Courts. Land Courts khusus mengadili perselisihan-perselisihan mengenai kepemilikan tanah. Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi.

e. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri PNG sejak tahun 1981 adalah *active and selective engagement and to independence commitment to international relations* yang diarahkan untuk mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara tetangganya secara aktif dan selektif untuk kepentingan nasional di segala bidang. Sejak tahun 1994, kebijakan *Selective engagement* dilengkapi dengan *Look North, but Work the Pacific*. *Look North Policy* adalah upaya untuk mengembangkan hubungan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia lainnya, khususnya di bidang ekonomi dan



perdagangan. *Work the Pacific* erat kaitannya dengan *Pacific Plan*. Dengan kebijakan ini PNG aktif dalam mengkonsolidasikan hubungannya dengan negara-negara Kepulauan di Pasifik.

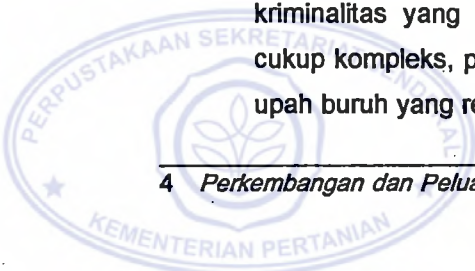
1.3. Sosial Ekonomi

PNG mempunyai potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan disamping itu memiliki kekayaan alam yang dapat dikembangkan seperti bahan tambang, kehutanan, keindahan alamnya untuk pariwisata dan perikanan (karena memiliki luas lautan yang cukup besar) namun sumber-sumber kekayaan alam tersebut belum dapat sepenuhnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan nasional PNG.

Komoditi ekspor utama PNG adalah hasil tambang (emas, tembaga, minyak mentah), hasil hutan (kayu gelondongan), hasil pertanian (kopi, kopra, minyak kelapa, dan minyak sawit). Negara utama tujuan komoditas ekspor adalah Australia, Jepang, Jerman, Korea Selatan dan Inggris. Total ekspor pada sektor pertambangan memberikan kontribusi rata-rata 65% pertahun, sementara sektor pertanian dan kehutanan hanya menyumbang sekitar 24,6% dari total ekspor PNG. Sedangkan barang-barang impor adalah mesin-mesin, peralatan angkutan, bahan makanan, ternak, bahan kimia dan minyak pelumas. Barang-barang impor terutama didatangkan dari Australia, Jepang, AS, Singapura dan Selandia Baru.

Total ekspor PNG ke luar negeri tahun 1998 menncapai nilai US\$1,264 juta (mengalami peningkatan sebesar 17% dimana pada tahun 1997 mencapai US\$1,7 milyar), sedangkan impornya sebesar US\$ 760 juta.

Usaha Pemerintah PNG untuk menarik modal asing ke PNG nampaknya masih mengalami kendala-kendala antara lain seperti kriminalitas yang masih cukup tinggi, pemilikan tanah yang relatif cukup kompleks, peraturan-peraturan yang sering tidak konsisten dan upah buruh yang relatif mahal.



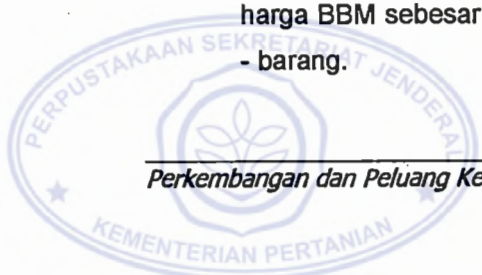
Defisit anggaran negara di tahun 1998 mencapai jumlah K 192 juta (US\$ 96 juta), kondisi ini berada pada tahap krisis sebagai akibat dari situasi global krisis moneter di kawasan Asia Pasifik.

Budget PNG tahun 1999 (disahkan Parlemen tanggal 24 Nopember 1998) sebesar lebih dari K 2 Milyar. Total pendapatan PNG tahun 1999 diperkirakan sebesar K 2.339,6 juta atau mengalami penurunan sebesar K 71,7 juta dari total pendapatan 1998. Sedangkan Total pengeluaran mengalami penurunan menjadi sekitar K. 3.054 juta, dan K 2.200 juta pada tahun 1998. APBN tahun 1999 lebih menitikberatkan pada pembangunan di daerah-daerah propinsi dan menekankan perlunya efisiensi di segala sektor.

Sektor Pariwisata merupakan sumbangan yang cukup besar dalam kontribusi penerimaan devisa. Pada tahun 1996 Pemerintah PNG menerima devisa K.1 00 juta (US\$ 73 juta). Sedangkan pada tahun 1997 Wisman yang masuk ke PNG sejumlah 145 000 orang.

Menurut Index Tahunan yang dikeluarkan oleh "United Nations Development Programme" (UNDP) sebagaimana tertera dalam *human development index* 1997-1998, PNG menempati urutan ke-129 dalam negara-negara yang memiliki tingkat harapan hidup yang masih rendah. Hal ini terlihat dari tingkat daya beli rata-rata masyarakat PNG dikaitkan dengan kenaikan harga kebutuhan masyarakat saat ini. Kenaikkan harga barang tersebut juga disebabkan merosotnya nilai tukar Kina terhadap dollar Amerika. UNDP juga menilai bahwa tingkat pengangguran di PNG semakin menanjak.

Untuk memperbaiki ekonominya, PM Morauta mencanangkan Program Mini Budget. Salah satu pelaksanaan program tersebut adalah dengan menaikkan tarif pajak BBM sebesar 78%. Sebelumnya pada semester pertama 1999, Pemerintah PNG telah menaikkan harga BBM sebesar 58%. Hal ini telah memicu naiknya harga barang - barang.



Disamping itu, PM Morauta juga menyatakan PNG membutuhkan dana bantuan sebesar US\$ 400 juta (K 1 Milyar) untuk merestrukturisasi ekonominya. Untuk mendapatkan bantuan itu, Pemerintah Morauta telah mendekati IMF dan Bank Dunia serta negara - negara yang tergabung dalam APEC. Selain itu Pemerintah PNG mendapatkan bantuan dari Commonwealth Development Corporation (CDC) dan European Union (EU).

Dalam upaya untuk memperbaiki perekonomian, PNG melakukan reformasi di bidang ekonomi yang dilaksanakan atas bantuan IMF dan World Bank dalam bentuk *Stand By Credit Arrangement*. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan ekonomi serta indikator sosial PNG. Upaya ini terlihat berhasil dimana terdapat perubahan, salah satunya defisit fiskal dapat ditekan menjadi 5 % per Juni 1999.

Bulan juni 2000 Bank Dunia menyetujui bantuan *struktural adjustment* kepada PNG sebesar US\$ 90 juta ditambah oleh bantuan dari Jepang, Uni Eropa dan Australia yang masih dalam kerangka bantuan Bank Dunia, sehingga total bantuan Bank Dunia sebesar US\$ 375 juta yang diberikan dalam beberapa tahap.



II. POTENSI NEGARA

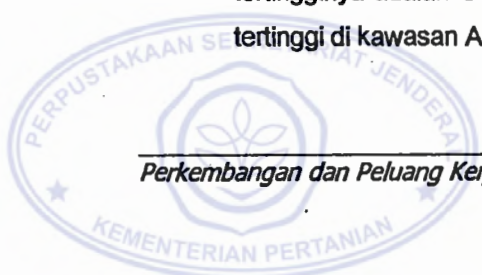
2.1. Keadaan Geografis

Papua New Guinea (PNG) merupakan negara *Monarki* konstitusional di Samudera Pasifik, yang letaknya di sebelah utara Australia, berbatasan langsung dengan Propinsi Irian Jaya (Papua), Indonesia di sebelah barat, dengan ibukotanya *Port Moresby*. Nama resmi lain adalah : *Independent State of Papua New Guinea*, Kina (K), merupakan satuan mata uang resmi yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dinegara ini. Karena negara ini menganut sistim Monarki konstitusionil, maka Raja/Ratu Inggris yang diwakili oleh *Gubernur Jenderal* sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh *Perdana Menteri*.

Papua New Guinea, mempunyai jumlah penduduk sekitar : 3.834.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk : 8 jiwa/km². Sebagian besar penduduk negara ini terdiri dari ras Melanesia, Papua, dan Negro. Selain itu terdapat pula sejumlah kecil ras kulit putih, Asia dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk terus bertambah selama dua dekade terakhir.

Sebagian besar penduduk di Papua New Guinea menganut agama *Kristen Protestan (58%)*, kemudian *Katholik Roma (32%)*, *Baha'i* yang merupakan kepercayaan tradisional (10%). Negara ini menggunakan bahasa resmi : *Bahasa Inggris*, disamping bahasa lokal *Melanesia, Papua*.

Wilayah utama Papua New Guinea adalah sebagian dari Pulau Irian, yaitu di bagian timur, yang meliputi 85% dari seluruh wilayah negara ini. Wilayah tersebut memiliki ciri-ciri geografis yang sangat mencolok, yaitu adanya banyak pegunungan. Pegunungan-pegunungan ini membentang dari timur ke barat, disepanjang Pulau Irian; puncak tertingginya adalah Gunung Wilhelm (4.509 m), yang merupakan puncak tertinggi di kawasan Australia dan Oceania.



Di daratan utama Papua New Guinea terdapat sungai-sungai utama, yaitu sungai Sepik dan sungai Fly yang menjadi batas antara PNG dengan Propinsi Irian Jaya (Indonesia). Di sepanjang pantai terbentang daerah rawa yang luas.

Wilayah Papua New Guinea juga mencakup pulau-pulau di sekitarnya, yaitu P. New Britain, P. New Ireland, P. New Hanover dan Kep. Admiral di gugus Kep. Bismarck, P. Bougainville dan P. Buka di Kep. Solomon, Kep. D' Entrecasteaux dan Kep. Tobriand, Kep. Louisiade dan P. Woodlark. Pulau-pulau kecil yang terpencil di wilayah ini merupakan puncak-puncak gunung dasar laut yang tersembul ke permukaan, di antaranya banyak yang di kelilingi terumbu karang.

Secara keseluruhan wilayah Papua New Guinea tertutup hutan tropis leba, yang meliputi sekitar 75% wilayah tersebut. Oleh karena keadaan tanah yang rendah dan biasanya tidak subur, maka di wilayah ini ditemui sedikit lahan pertanian yang sangat produktif.

Di Papua New Guinea terdapat banyak binatang, yang ada kaitannya dengan *fauna* Australia. Jenis-jenis *marsupialia* (mamalia berkantung) yang terdapat di Papua New Guinea antara lain : walabi, kanguru pohon, dan posum. Juga terdapat *ekhidna* (landak semut); sedangkan kalong, buaya dan ular terdapat dalam jumlah besar. Terdapat sekitar 860 jenis burung di Papua New Guinea diantaranya yang paling terkenal ialah burung cenderawasih berwarna cemerlang. Burung ini sebelumnya banyak diburu karena harganya sangat mahal. Namun sekarang populasinya semakin bertambah banyak sejak larangan ekspor burung cenderawasih diberlakukan di Papua New Guinea.

Negara ini mempunyai iklim panas dan basah. Perbedaan suhu antara daerah pegunungan dan dataran rendah tidak terlalu jauh. Suhu di daerah pegunungan sekitar 20° C, sedangkan di dataran rendah berkisar dari 24-28° C. Wilayah ini menerima curah hujan rata-rata 2.030 mm/tahun.



2.2. Potensi Alam dan Pertanian

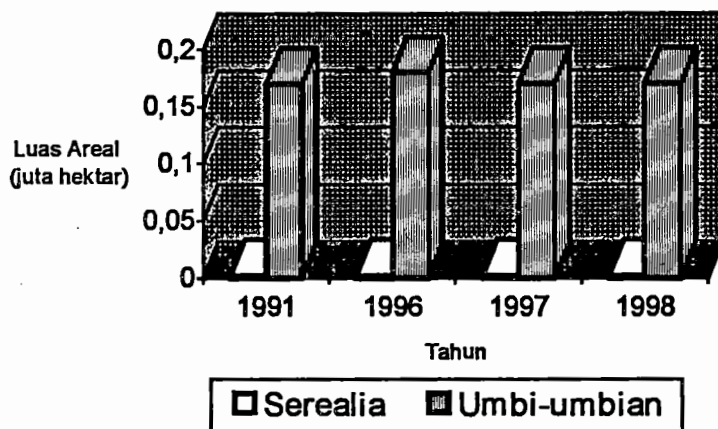
Sumber pendapatan penduduk negara ini sebagian besar mengandalkan dari hasil pertanian. Hasil pertanian yang terpenting adalah : ubi jalar, ubi kayu, talas, kokoa, kelapa, kopi, karet, teh dan minyak kelapa. Hasil hutan yang tidak kalah pentingnya antara lain kayu. Berkat bantuan modal dan peralatan luar negeri, berkembang industri perikanan dan pembudidayaan mutiara. Perikanan menghasilkan ekspor ikan tuna dan udang. Domba dipelihara di dataran tinggi, peternakan sapi khususnya *hibrida zebu*, telah diperkenalkan.

Tambang mineral lainnya yang menjadi penunjang ekonomi negara ini, antara lain tambang emas, perak, tembaga dan gas alam. Potensi tembaga terdapat di pegunungan Star dan di pegunungan Bougainville dan telah ditambang sejak tahun 1971. Gas alam ditemukan di Teluk Papua. Tembaga, hasil tambang yang terpenting, merupakan komoditas ekspor terbesar negara ini.

Industri utama Papua New Guinea ialah industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Selain itu terdapat banyak industri bir, bahan makanan, botol, drum dan ember baja, barang-barang kampas, bahan-bahan kimia untuk pertanian dan industri, rokok dan barang-barang konsumsi lainnya. Selain itu, ekspor utama Papua New Guinea lainnya adalah emas, kopi, kayu, biji cokelat, minyak kelapa dan kopra.

Perkembangan luas areal komoditas sereal dan umbi-umbian di Papua New Guinea dari tahun 1991 s/d 1998 dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Data Perkembangan Luas Areal Tanaman Sereal dan Umbi-umbian Negara Papanugini tahun 1991-1998



III. PERKEMBANGAN KERJASAMA

3.1. Kerjasama Bidang Politik

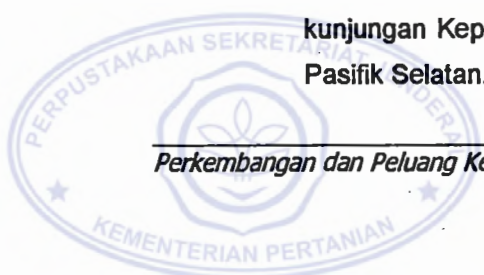
PNG menjadi anggota PBB pada tanggal 16 September 1975, dan tahun 1992 menjadi anggota Gerakan Non-Blok. Selain itu, PNG menjadi peserta dalam *Lome Convention* (1976), anggota Forum Pasifik Selatan, *South Pasific Commission* dan *Melanesian Spearhead Group* yang beranggotakan PNG, Vanuatu, Solomon Islands, dan FLNKS (Gerakan Pembebasan Rakyat Kanak di Kaledonia Baru). Di bawah PM Bill Skate, PNG berusaha untuk mengatasi ketergantungannya kepada Australia, dengan lebih menjalin kerjasama dengan negara-negara lain.

PNG memperoleh status sebagai negara peninjau ASEAN pada tahun 1976. PNG menandatangani *treaty of Amity and Cooperation - South East Asia* pada AMM ke-22 di Bandar Sri Begawan Juli 1989. Hingga saat ini PNG merupakan satu-satunya negara peninjau dalam ASEAN. Kerjasama dengan ASEAN tersebut memungkinkan PNG untuk terlibat dalam ARF yang merupakan forum dialog keamanan di Asia Pasifik.

Indonesia dan PNG mulai menjalin hubungan konsuler pada tahun 1973 dan kemudian ditingkatkan menjadi hubungan diplomatik segera setelah PNG mendapatkan kemerdekaan dari Australia pada tanggal 16 September 1975. Hubungan kedua negara sebelumnya mengalami pasang surut karena adanya rasa curiga dari pihak PNG terhadap Indonesia dan sikap beberapa kelompok intelektual PNG yang mendukung gerakan pengacau keamanan Papua Merdeka (OPM).

Hal-hal yang menonjol dari hubungan kedua negara adalah:

- Kunjungan Presiden Soeharto bulan Juni 1979, yang merupakan kunjungan Kepala Negara asing pertama ke PNG, diluar negara Pasifik Selatan.

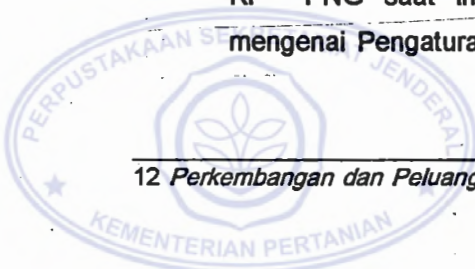


- *Agreement on Technical Cooperation* 5 Juni 1979.
- *Basic Agreement on Border Arrangement*, suatu kesepakatan masalah-masalah perbatasan pada tahun 1979 yang direvisi tahun 1984 dan 11 April 1990. Persetujuan ini melahirkan "Joint Border Committee" antar Pejabat - Pejabat Senior kedua negara.
- *Treaty of Mutual Respect, Friendship and Cooperation* di Port Moresby, 27 Oktober 1986.
- Dukungan Indonesia status "*observer*" dalam forum ASEAN.
- Dukungan Indonesia atas keanggotaan PNG dalam APEC.
- Pemerintah PNG secara resmi melarang kegiatan GPK/ OPM di wilayahnya.
- Peranan PNG dalam menggugurkan masalah Irian Jaya dan Timor Timur dalam sidang Dekolonisasi PBB.
- Penandatanganan MOU Pembentukan Joint Commission RI-PNG, Jakarta, Juni 1999.

Sejak ditandatangani Perjanjian Saling Menghormati, Persahabatan dan, Kerjasama pada tanggal 27 Oktober 1986, yang kemudian menjadi dasar bagi persetujuan-persetujuan kerjasama antara Indonesia dan PNG, perkembangan hubungan kedua negara dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang positif di berbagai bidang. Khusus mengenai masalah perbatasan kedua negara, dapat ditangani dengan baik melalui "Joint Border Committee" (JBC), "Border Liaison Meeting" (BLM), "Joint Technical Sub-Committee" (JTSC) dan "Joint Sub- committee on Security" (JSCC).

3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi

Hubungan RI-PNG dibidang ekonomi sampai saat ini baru memasuki tahap awal perkembangan. Hubungan Perdagangan antara RI - PNG saat ini hanya didasarkan pada Persetujuan Dasar mengenai Pengaturan Perbatasan antara RI-PNG tahun 1979 pasal



10 tentang *Customary Border Trade* dan diperbaharui pada tahun 1984.

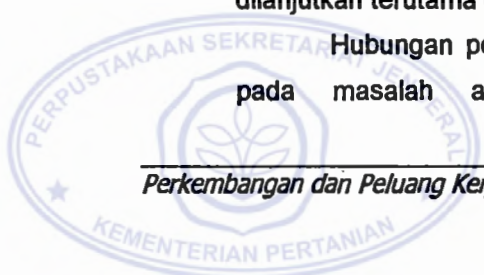
Dengan ditandatanganinya Persetujuan Saling Menghormati, Persahabatan dan Kerjasama antara RI-PNG bulan Oktober 1986, masalah perdagangan diatur dalam pasal 16 yang menyebutkan "*the contracting parties shall endeavour to facilitate and promote trade and economic relations*".

Landasan-landasan formal kerjasama ekonomi yang telah dimiliki oleh kedua negara adalah sebagai berikut:

- *Air Transport Agreement*, 29 Pebruari 1990
- Persetujuan Kerjasama Kadin Indonesia dan Kadin PNG, 11 Pebruari 1993.
- *Lease Agreement of Palapa Transponder*, antara PT TELKOM Indonesia dengan *Telecommunication Corporation of Papua New Guinea* (PTC-PNG) tanggal 7 Agustus 1993 yang diperbarui 20 Desember 1990.
- MOU antara PTC-PNG dengan PT Indosat, 17 Mei 1993.
- *Agreement on International Telecommunication Services* antara PTC-PNG dan PT Satelit Palapa Indonesia, 26 September 1994

Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)" Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini. Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.

Hubungan perdagangan kedua negara nampaknya terbentur pada masalah angkutan, sistem preferensi yang kurang



menguntungkan Indonesia, volume permintaan akan barang Indonesia yang masih sangat kecil serta kesamaan komoditas ekspor kedua negara. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, terutama Singapura dan Malaysia, penetrasi ekspor Indonesia selama ini masih kurang. Perdagangan perbatasan pada saat ini tidak lagi terbatas pada perdagangan komoditi tradisional, tetapi juga komoditi non-tradisional seperti garment, barang-barang manufaktur, dan elektronik. Untuk meningkatkan perdagangan perbatasan pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan bagi penduduk PNG untuk berbelanja di KUD-KUD yang ada di sekitar perbatasan.

Komoditas ekspor Indonesia ke PNG setiap tahun adalah produk konsumsi masyarakat, peralatan listrik dan elektronik, kontainer, kertas koran, sepatu, pakaian jadi dan tekstil, suku cadang kendaraan bermotor. Sedangkan komoditas impor Indonesia dari PNG adalah BBM, minyak nabati, bahan mentah asal tumbuhan, besi. Impor Indonesia ke PNG hanya bisa mengisi 1,9% dari seluruh total impor PNG yang pada tahun 1997 berjumlah US\$ 1 484 juta.

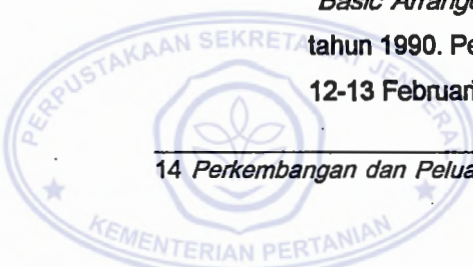
Untuk meningkatkan perdagangan RI-PNG, saat ini sedang dibahas Draft Perjanjian Perdagangan antara RI-PNG, yang rencananya akan ditandatangani dalam waktu dekat.

3.3. Kerjasama Teknik

a. Pertemuan Bilateral

Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara Indonesia - Papua New Guinea belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum adanya suatu kerjasama teknik bidang pertanian secara khusus kedua negara yang dituangkan di dalam suatu *"Memorandum of Understanding" (MOU)*.

Dasar hubungan bilateral RI-PNG masih mengacu pada *"Basic Arrangement"* yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai "Review Basic



Arrangement" yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun.

Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah pabean dan karantina. (*Pasal 12: "Custom and Quarantine"*), yang mencakup hal-hal :

- Koordinasi/kerjasama dan pertukaran informasi antara kedua belah pihak
- Koordinasi pengaturan prosedur ke-Pabean-an, pengaturan tarif dan larangan
- Koordinasi serta melakukan diskusi jika diperlukan untuk membahas masalah yang timbul berkaitan dengan masalah pabean.
- Dll.

Pertemuan Tripartite ke-5 on Agricul Health and Quarantine (Indonesia-Australia-Papua New Guinea) dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2001 di Jakarta, hadir pada kesempatan ini masing-masing adalah : Dr. David Bank (delegasi Belanda) Dr. John Kola (delegasi Papua New Guinea), dan Ir. P. Natigor Siagian (Indonesia). Pertemuan tersebut membahas butir-butir penting, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Dari masing-masing country paper, terangkat informasi bahwa telah teridentifikasi adanya beberapa hama dan penyakit potensial yang dikhawatirkan dapat menyebar diantara ketiga negara. Untuk itu perlu adanya studi bersama yang dilakukan di tiga negara.
- 2) Guna meningkatkan kemampuan teknis penyelenggara kesehatan hewan dan perkarantinaan, diharapkan dapat dimunculkan proposal kerjasama "Capacity Building Project".



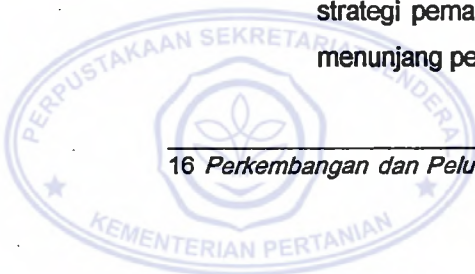
- 3) Australia dan PNG mengharapkan agar Indonesia dapat mulai menginisiatifkan "ASEAN Pest and Disease Control Project" pada SOM AMAF mendatang. Usulan ini berisikan studi, identifikasi dan pengendalian hama dan penyakit komoditas pertanian dan perkarantinaaan di negara-negara ASEAN, PNG dan Australia mengharapkan agar adanya proyek bersama ASEAN yang diharapkan dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit ke daerahnya.
- 4) Indonesia mengajukan usulan untuk pendirian Spesial Laboratorium di Irian Jaya dan beberapa daerah perbatasan diantara ketiga negara. Diusulkannya Irian Jaya, karena Laboratorium terdekat yang ada saat ini (Maros) yang sangat sulit mendukung aktifitas perkarantinaaan secara efektif.
- 5) Australia menawarkan keikut-sertaan tenaga teknis perkarantinaaan junior untuk berpartisipasi dalam training yang diselenggarakan secara bilateral di Australia.
- 6) Pertemuan berikutnya direncanakan pada bulan Maret/April 2002 di Papua New Guinea bersamaan dengan Bilateral Meeting ke-6.

b. Kunjungan / Pelatihan

Kunjungan rombongan Mahasiswa PNG ke Indonesia

Pada tanggal 16 Nopember s/d 2 Desember 1996 telah berkunjung ke Indonesia rombongan Mahasiswa dari "*Higlands Agricultural College*", Mt. Hagen, Papua New Guinea yang berjumlah 50 orang.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempelajari dari dekat tentang perkembangan pertanian di Indonesia, khususnya bidang peternakan, perikanan, manajemen pelayanan, penyuluhan, strategi pemasaran dan fasilitas-fasilitas pinjaman keuangan dalam menunjang pengembangan pertanian.



Kunjungan Petani & Asosiasi Kelapa Sawit PNG ke Indonesia

Pada tanggal 8 s/d 18 Juli 1996 telah berkunjung rombongan dari PNG yang terdiri dari petani dan asosiasi kelapa sawit.

Maksud kunjungan adalah dalam rangka :

- Menambah pengetahuan/pengalaman para petani/ pejabat terkait tentang kemajuan-kemajuan di bidang "*Processing dan Marketing*" kelapa sawit di Indonesia.
- Mengadakan pertemuan dengan para petani, tenaga ahli maupun para peneliti di pusat-pusat penelitian kelapa sawit.
- Mengadakan kunjungan ke lapangan (petani kelapa sawit) yang telah sukses mengembangkan perkebunan kelapa sawit.
- Mengadakan tukar menukar informasi/pengalaman dengan sesama petani kelapa sawit di Indonesia.
- Mengunjungi instansi terkait lainnya yang mempunyai kontribusi penting di dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Kunjungan Tim Studi Banding PNG ke Jayapura, Indonesia

Dalam rangka melakukan studi banding teknik pengembangan tanaman padi, meninjau dan belajar tentang sistim tanaman/ pertanian padi di Jayapura dan sekitarnya, pada tanggal 11-12 Maret 2000 telah berkunjung rombongan dari "*Gulf Province*" salah satu propinsi di PNG. Rombongan terdiri dari para pejabat Pemerintahan, Ketua Kelompok Pertanian serta wakil dari para petani setempat.

Pelaksanaan kunjungan dimaksud diatur dan dikoordinir oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Irian Jaya.

Pelatihan Petani

Disamping Indonesia Cq. Dep. Pertanian telah melaksanakan pelatihan petani PNG dalam rangka Gerakan Non



Blok (GNB), juga sedang dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mempelajari dan mempersiapkan program pelatihan petani PNG di Indonesia (Jayapura) (12 orang petani / 6 pasangan suami-istri), sebagai tindak lanjut hasil pertemuan bilateral antara Duta Besar RI dengan Ketua Parlemen PNG tanggal 3 Oktober 2000, di Post Moresby.

Pertukaran Informasi

Dibidang pertukaran informasi, memenuhi permintaan pihak "*East Britain Provincial Administration*" (ENBPA), PNG Indonesia telah menyampaikan informasi tentang processing kelapa sawit di Indonesia, sebagai berikut :

Historical Statistics (development, production, export, Indonesian consumption)

- 1) Structure of the Industry
- 2) Location of the Industry
- 3) Intended Expansion
- 4) Soils (most suitable)
- 5) Planting Material
- 6) Climate (rainfall, sunlight/solar radiation) most suitable
- 7) Transport Infrastrukture
- 8) Social Infrastrukture (schools, hospitals, community centers)
- 9) Production Models (eg. Nucleus Estate/Settlers)
- 10) Incentive to Develop.
- 11) What is meant by "plasma/tree crop transmigration program"



IV. PELUANG KERJASAMA

Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara partner. Investasi asing di Indonesia dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

(US\$ Million)

| Tahun | Sektor Pertanian | | | | Industri Makanan |
|-------|------------------|------------|------------|-----------|------------------|
| | Tanaman Pangan | Peternakan | Perkebunan | Perikanan | |
| 1996 | 52,2 | 86,0 | 1.168,1 | 79,8 | 691,4 |
| 1997 | 234,4 | 1,8 | 200,4 | 27,1 | 572,8 |
| 1998 | 224,4 | 15,4 | 725,4 | 33,0 | 342,0 |
| 1999 | 80,6 | 48,3 | 283,8 | 69,7 | 680,9 |
| 2000 | 311,3 | 18,4 | 59,1 | 49,5 | 701,0 |

Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Adapun jenis komoditas, bidang investasi dan lokasi yang dapat dipromosikan secara bilateral dalam menarik investasi asing tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran 3.



Tabel Lampiran 1. PROFILE NEGARA PAPUA NEW GUINEA

1. Nama Resmi : The Independent State of Papua New Guinea
2. Ibukota : Port Moresby
3. Letek : Antara 141 dan 161 derajat BT (2 100 km) dan 0 dan 14 derajat garis LS (1 575 km)
4. Perbatasan : Barat : Indonesia (Propinsi Irian Jaya)
Utara : Federasi Mikronesia
Timur : Kep. Solomon dan Nauru
Selatan : Australia
5. Wilayah : 2.243 km² dan luas lautan 3.1 juta km² terdiri dari bagian timur Pulau Irian dan 600 buah pulau kecil
6. Iklimi : Tropis
7. Pembagian Wilayah : 19 Propinsi dan 1 Daerah Khusus Ibukota
8. Penduduk : 4.926.984 (perkiraan bulan Juli 2000)
9. Bentuk Negara : Kerajaan Konstitusional
10. Hari Nasional : 16 september (Hari Kemerdekaan)
11. Agama : Protestan (63%), Katholik (31%), serta Islam dan Hindu (pendatang dan relatif kecil)
12. Bahasa : Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan bahasa Pidgin serta bahasa Motu
13. Ekonomi : Mata uang : Kina, Kurs 1 K = US\$ 0.37 (Oktober 1999)
Sumber Alam : Tembaga, emas, perak, gas alam, minyak bumi, hasil hutan dan perikanan
GDP 1999 : US\$ 11.6 milyar
GDP percapita (1999) : US\$ 2.500
Inflasi : 16.5 %



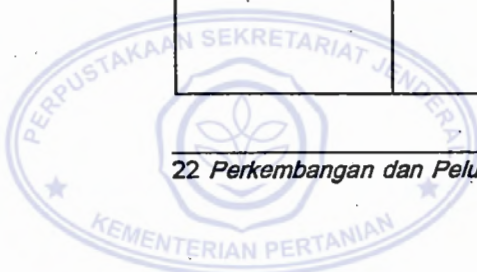
Table Lampiran 2. SUSUNAN KABINET PEMERINTAHAN PM. SIR MEKERE MORAUTA (per Januari 2001)

| | | | |
|-----|--|---|--------------------|
| 1. | Perdana Menteri | : | Sir Mekere Morauta |
| 2. | Wakil PM, Menteri Kehutanan, Kebudayaan dan Tourisme | : | Michael Ogio |
| 3. | Menteri Luar Negeri dan Masalah Bougainville | : | Bart Philemon |
| 4. | Menterei Pertanahan | : | John Pundari |
| 5. | Menteri Perumahan | : | Christ Haiveta |
| 6. | Menteri Kepolisian | : | Bagia Gagarimabu |
| 7. | Menteri Energi dan Perminyakan | : | Tommy Tomscroll |
| 8. | Menteri Perdagangan dan Industri | : | John Tekwie |
| 9. | Menteri Pertambangan | : | Michael Laimo |
| 10. | Menteri Kehakiman | : | Puri Riung |
| 11. | Menteri Komunikasi dan Teknologi Tinggi | : | Sir John Kaputin |
| 12. | Menteri Pertahanan | : | Kilroy Genia |
| 13. | Menteri Pengembangan Daerah | : | Andrew Kumbakor |
| 14. | Menteri Dalam Negeri | : | William Ebenosi |
| 15. | Menteri Pertanian | : | Muki Taranupi |
| 16. | Menteri Pemeriksa Institusi (Jaksa Agung) | : | Henry Smith |
| 17. | Menteri Pekerjaan Umum dan Implementasi | : | John Kamb |
| 18. | Menteri Perencanaan | : | Moi Avie |
| 19. | Menteri Transportasi dan Penerbangan Sipil | : | Barth Philemon |
| 20. | Menteri Perikanan dan Sumber Kalautan | : | Ron Ganarafo |
| 21. | Menteri Privatisasi | : | Vincent Auli |
| 22. | Menteri Pendidikan | : | John Waiko |
| 23. | Menteri Pelayanan Masyarakat | : | Philemon Embel |
| 24. | Menteri Provinsi dan Pemerintahan Daerah | : | Lairo Embel |
| 25. | Menteri Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam | : | Herowa Agiwa |



Tabel Lampiran 3. Peluang Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

| Commodities | Fields of investment | Provinces |
|------------------|---|---|
| Food Crop | | |
| 1. Paddy/rice | <ul style="list-style-type: none"> - Production input - Seeding - Agric. Machinery service - Marketing - Rice Milling Unit - Processing (rice powder) | West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, South Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara Barat. |
| 2. Cassava | <ul style="list-style-type: none"> - Marketing - Processing (tapiokca, <i>pellet glucosa</i>, starch, sorbitol, spiritus, dextrin) | Lampung, North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, East Nusa Tenggara |
| 3. Corn | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (maize, cooking oil, maizena, ethanol, maize powder, feed, <i>organic acid</i>) | West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, East Nusa Tenggara, North Sulawesi |
| 4. Soybean | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Marketing - Processing (tempe, sauce, ketchup, powder, feed, cooking oil, nata de soy) | West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, south Sulawesi, Lampung, West Nusa Tenggara |
| 5. Groundnut | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing | North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi |
| 6. Mungbean | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing | North Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi |



| | | |
|-----------------|--|--|
| 7. Sweet potato | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing | North Sumatera, West Sumatrera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara, South Kalimantan, South East Sulawesi, South Sulawesi, Irija |
|-----------------|--|--|

| Commodities | Fields of investment | Provinces |
|---------------------------|---|---|
| Horticulture | | |
| 1. Manggo | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned juice, dried fruit, jam, jelly, pickle</i>) - Marketing | West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Bali, NTB, NTT, South Sumatera, North Sumatera, Lampung, Yogyakarta |
| 2. Durian | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Marketing | North Sumatera, West Sumatrera, Riau, South Sumatera, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan |
| 3. Rambutan (hairy fruit) | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing | West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bali, South Kalimantan, Central Sulawesi |
| 4. Mangosteen | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>canned</i>) - Marketing | North Sumatera, West Java, Bali, South Sulawesi, West Sumatera, Riau, Central Java, East Java |
| 5. Salacca (snake fruit) | <ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing (<i>syrup, dried fruit, canned</i>) - Marketing | Central Java, Yoyagakrta, East Java, North Sumatera, North Sulawesi, South Sulawesi, Bali, NTB, West Java, Irian Jaya |



| | | |
|-------------|---|---|
| 6. Orange | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing - Marketing | North Sumatra, West Sumatra, Jambi, West Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan |
| 7. Banana | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>Powder, chips, puree, jam, wine, syrup, nector, juice, jelly</i>) - Marketing | North Sumatra, West Sumatra, South Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java, NTB, NTT, Bali, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, West Kalimantan |
| 8. Potato | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>chips, powder</i>) - Marketing | North Sumatra, West Sumatra, Jambi, South Sumatra, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi |
| 9. Cabbage | <ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Marketing - Processing | North Sumatra, West Sumatra, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, Jambi, South Sumatra, Lampung, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi |
| 10. Chilli | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Cultivation - Processing (<i>sauce, paste, powder, chilli oil, dried chilli</i>), | North Sumatra, Riau, West Sumatra, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta, South Sulawesi, North Sulawesi, NTB, Bali |
| 11. Shallot | <ul style="list-style-type: none"> - Processing - Marketing | North Sumatra, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, NTB, West Sumatra, Lampung |
| 12. Carrot | <ul style="list-style-type: none"> - Cultivation - Processing - Marketing | North Sumatra, West Sumatra, Bengkulu, South Sumatra, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi |
| 13. Tomato | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing | North Sumatra, West Sumatra, Bengkulu, |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| | - Marketing | South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi |
| 14. Orchid and other ornamental plant | - Seedling - Cultivation - Processing (<i>oriental plant : parfume</i>) - Marketing | North Sumatera, Bengkulu, Jambi, West Java, West Kalimantan, East Kalimantan, Irian Jaya, Riau, North Sulawesi, Bali, Yogyakarta, Jakarta |
| 15. Medicine plant | - Seedling - Cultivation - Processing (traditional medicine/jamu) - Marketing | North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi |

| Commodities | Fields of investment | Provinces |
|------------------|--|--|
| Livestock | | |
| 1. Cattle | - Breeding - Fattening - Processing (<i>corned beef, sausage, leather industry</i>) - Marketing | West Sumatera, Lampung, South Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT |
| 2. Dairy cow | - Breeding - Fattening - Processing (milk, milk sweet, cheese, <i>yoghut</i>) - Marketing | West Java, Central Java, East Java, Lampung |
| 3. Poultry | - Breeding - Cultivation - Processing (<i>corned, sausage</i>) - Marketing | Java, Lampung, South Sulawesi, East Kalimantan |
| 4. Goat | - Breeding - Fattening - Processing (milk, leather, sausage) - Marketing | Sumatera, Java, West Kalimantan |
| 5. Pig | - Breeding - Fattening - Processing (sausage) - Marketing | West Kalimantan, Riau, Islands, North Sumatera, Irian Jaya |

| Commodities | Fields of investment | Provinces |
|---------------|--|---|
| Estate | | |
| 1. Rubber | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (latex, dried rubber, <i>crumb rubber, slab</i>) - Marketing | North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi |
| 2. Palm oil | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (CPO, <i>palm karnel, sludge</i>) - Marketing | North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya |
| 3. Coffe | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (powder, <i>cofee green, instan coffe</i>) - Marketing | North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya |
| 4. Cacao | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (<i>cocoa, powder, cocoa cake, fat, shall, pilp</i>) - Marketing | North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Bali, NTT, Bengkulu, West Java, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya |
| 5. Cashew nut | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (fried <i>cashew nut, shell liquid, sweet</i>) - Marketing | Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east |



| | | |
|------------|---|--|
| 6. Coconut | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (cooking oil, coconut coal/varang, handy craft) - Marketing | <p>Sulawesi, Irian Jaya North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya</p> |
| 7. Pepper | <ul style="list-style-type: none"> - Seedling - Processing (medicines, pepper powder, seasoning) - Marketing | <p>South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Kalimantan, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, South-east Sulawesi</p> |



BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001

